

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Gambara Umum Objek Penelitian

Pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian ini adalah semua pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat melalui website BPK, Kemendagri, dan Kemenkeu tahun 2013.

Dalam penelitian ini objek penelitian dipilih dengan metode purposive sampling dengan ketentuan Pemda kabupaten dan kota yang dipilih memiliki semua data yang lengkap meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan memerlukan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk mendapatkan jumlah temuan audit. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 474, berdasarkan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 259 pemerintah daerah kabupaten dan kota.

B. Analisis statistik Deskriptif

TABEL 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Ukuran Pemerintah Daerah | 259 | 27.015 | 31.249 | 28.284 | .68794 |
| Pendapatan Asli Daerah | 259 | .0044 | .5332 | .0794 | .07279 |
| Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat | 259 | .0013 | .8818 | .5948 | .14918 |
| Belanja Modal | 259 | .08 | .98 | .2449 | .09559 |
| Temuan Audit | 259 | .00002 | .08233 | .0055 | .00924 |
| Kinerja Pemda Kabupaten/Kota | 259 | .58 | 3.38 | 2.3129 | .66776 |
| Valid N (listwise) | 259 | | | | |

Tabel diatas menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Rata-rata skor kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 2,312 yang berarti rata-rata kinerja pemerintah daerah sudah bagus karena berada pada kriteria tinggi. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja tertinggi adalah Kabupaten Tuban, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Deiyai.

Variabel ukuran daerah memiliki rata-rata logaritma natural dari total aset sebesar 28,284. Daerah yang memiliki jumlah aset terbesar adalah Kota Surabaya sebesar 31,249 dan sedangkan yang terendah adalah daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar 27,015.

Variabel pendapatan asli daerah yang diukur dengan PAD menunjukkan rata-rata sebesar 0,0794 atau sebesar 8%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah PAD pada total pendapatan pemda masih sangat kecil. Nilai PAD terbesar adalah 0,5332 dan yang terkecil adalah 0,0044.

Variabel tingkat ketergantungan terhadap pusat yang diukur dengan DAU menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5948 atau sebesar 59 %, hal ini menunjukkan bahwa jumlah DAU dalam total pendapatan suatu pemerintah daerah sangat besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang ada di Indonesia kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Nilai DAU terbesar adalah 0,8818 dan yang terkecil adalah 0,0013.

Variabel belanja modal memiliki nilai rata-rata belanja modal sebesar 0,2449 atau sebesar 24%. Dengan belanja modal pemda terbesar adalah 0,98 dan belanja modal pemda terkecil adalah sebesar 0,08.

Untuk variabel temua audit nilai rata-rata temuan audit adalah sebesar 0,05. Yang berarti rata-rata temuan audit di pemda kabupaten/kota adalah sebesar 5% dari total anggaran belanja pemerintah daerah. Nilai pemda yang temuan auditnya tertinggi adalah sebesar 0,0823 dan yang terendah adalah sebesar 0,00002.

C. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ditujukan untuk menghindari adanya variabel pengganggu dalam persamaan regresi, yang dapat mengganggu prediksi dari persamaan regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

TABEL 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | Unstandardized Residual |
|------------------------|-------------------------|
| N | 259 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | 1.177 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .125 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. sebesar 0,125. Berdasarkan hasil tersebut nilai Asymp. Sig-nya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Nugroho, 2014)

TABEL 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Sig. | Keterangan |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| Ukuran Daerah | 0,102 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Pendapatan Asli Daerah | 0,362 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Tingkat Ketergantungan Dengan Pusat | 0,640 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Belanja Modal | 0,125 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Temuan Audit | 0,103 | Bebas Heteroskedastisitas |

Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa nilai sig. Pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Regresi yang baik adalah yang memiliki korelasi antar variabel independennya rendah. Dasar

pengambilan yaitu jika nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

TABEL 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel | Tolerance | VIF |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Ukuran Daerah | .659 | 1.517 |
| Pendapatan Asli Daerah | .629 | 1.590 |
| Tingkat Ketergantungan Dengan Pusat | .912 | 1.097 |
| Belanja Modal | .846 | 1.182 |
| Temuan Audit | .863 | 1.159 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai tolerance dari seluruh variabel independen memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi kita harus melihat nilai uji DW. Dari hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

TABEL 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

| Model | dU | DW | 4-dU |
|---------|---------|-------|---------|
| Kinerja | 1.82803 | 1.869 | 2.17197 |

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai DW sebesar 1.869 berada pada daerah $dU < DW < 4-dU$ yaitu : $1.82803 < 1.869 < 2.17197$ artinya tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

D. Analisis Data Dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode pengujian analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variable independen terhadap variabel dependen.

TABEL 4.6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | -11.470 | 3.395 | | -3.378 | .001 |
| Ukuran Pemerintah Daerah | 3.707 | .999 | .247 | 3.712 | .000 |
| Pendapatan Asli Daerah | .141 | .039 | .249 | 3.652 | .000 |
| 1 Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat | -.052 | .042 | -.070 | -1.234 | .218 |
| Belanja Modal | .076 | .071 | .063 | 1.072 | .285 |
| Temuan Audit | -.045 | .018 | -.145 | -2.489 | .013 |
| Adjusted Square R | .247 | | | | |
| F-Hitung | 17.897 | | | | |
| Sig F | .000 | | | | |

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Pada Tabel 4.6 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,247 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan

daerah, tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan audit memiliki pengaruh sebesar 24,7% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 75,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

2. Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat atau dependen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh simultan jika nilai $\text{sig} < 0,05$.

Berdasarkan pengujian statistik F pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F (0,000) yang lebih kecil dari alpha (0,05). Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu ukuran daerah, pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat, dan temuan audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemda karena nilai $\text{sig} < 0,05$.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dapat diterima jika memenuhi kriteria nilai $\text{sig} < 0,05$ dan arahnya berlawanan dengan arah hipotesis.

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian pada Tabel 4.6 menunjukkan variabel ukuran daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 3,707. Nilai signifikan

sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa hipotesis diterima, sehingga ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian pada Tabel 4.6 menunjukkan variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,141. Nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa hipotesis kedua diterima, sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian pada Tabel 4.6 menunjukkan variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,052. Nilai signifikan sebesar $0,218 > \alpha 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa hipotesis ketiga ditolak, sehingga tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

d. Pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian pada Tabel 4.6 menunjukkan variabel belanja modal memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,076. Nilai signifikan sebesar $0,285 > \alpha 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa hipotesis keempat ditolak, sehingga belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

e. Pengujian Hipotesis 5

Hasil pengujian pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel temuan audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,045. Nilai signifikan sebesar $0,013 < \alpha 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa hipotesis kelima diterima, sehingga temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

TABEL 4.7
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

| | Hipotesis | Hasil |
|----------------------|--|-----------------|
| H₁ | Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah | Diterima |
| H₂ | Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah | Diterima |
| H₃ | Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah | Ditolak |
| H₄ | Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah | Ditolak |
| H₅ | Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah | Diterima |

E. Pembahasan (interpretasi)

1. Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemerinta Daerah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran daerah maka akan semakin bagus kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut

mengartikan bahwa besarnya ukuran suatu daerah yang digambarkan dengan jumlah asset yang besar maka akan memudahkan kegiatan operasional pemerintah daerah yang nantinya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriyasi (2012) serta Utomo (2015) bahwa ukuran Pemda memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah, ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin bagus kinerja suatu pemerintah daerah. Disebutkan dalam Sumarjo (2010) bahwa pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya yang berimplikasi kepada masyarakat menggunakan PAD sebagai sumber pendanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menunjukkan sesuainya antara jumlah PAD yang besar terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerahnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Sudarsana (2013), dan juga Wenny (2012) yang menemukan bahwa pendapatan Pemda memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Pemda.

3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan pada pusat yang diukur melalui nilai DAU memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah. Disebutkan pada Indrarti dalam Utomo (2015) bahwa ketergantungan daerah terhadap DAU daripada PAD, berarti daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang rendah, ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dengan dana yang bersumber dari daerahnya sendiri karena lebih bergantung pada dana transfer dari pusat. Dengan kata lain ini juga menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengelola secara optimal kekayaan yang ada di daerahnya tersebut. Pengelolaan daerah yang belum optimal menunjukkan kinerja penyelenggaraan yang belum baik pula.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) dan juga Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa

tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa semakin besar belanja modal tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sudarsana (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hal tersebut mungkin terjadi karena adanya asimetri informasi antara pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah daerah lebih mempunyai akses langsung terhadap belanja modal.

Dengan adanya asimetri informasi itu, lebih mungkin terjadi penyalahgunaan dana atau korupsi oleh pemerintah. Dengan banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ini mengakibatkan semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya temuan ini berhubungan dengan variabel temuan audit yang dilakukan oleh BPK. Belanja modal harusnya lebih menunjukkan adanya pengeluaran yang produktif oleh pemerintah daerah yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudarsana (2013) menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

5. Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa variabel temuan audit memiliki berpengaruh yang negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa besarnya angka temuan audit oleh BPK maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian Mustikarini (2012) disebutkan bahwa semakin banyaknya temuan audit oleh BPK menggambarkan bahwa keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut kurang bagus, karena pengelolaan keuangan merupakan salah satu yang dinilai dalam EKPPD, yang nantinya akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah daerah harus lebih hati-hati dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara, karena hal ini tidak hanya berhubungan dengan masalah akuntansi, tapi juga berhubungan dengan kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi yang ada.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) dan Nugroho (2014) yang menunjukkan hasil bahwa temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja Pemda kabupaten dan kota.